

ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA DALAM DEBAT PUBLIK CALON PRESIDEN TAHUN 2019

Mikha Dormauli Septiana
Universitas PGRI Silampari Lubuklinggau
mikhadormauliseptiana@gmail.com

Submit, 14-06-2023

Accepted, 25-06-2023

Publish, 30-06-2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pematuhan dan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa dalam Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kuantitatif sehingga data pada penelitian ini berupa kalimat-kalimat yang mengandung pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu (1) dokumentasi, (2) transkripsi (3) metode simak dan baca, dan (4) pengkodean. Bentuk pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa ditentukan dengan teori kesantunan berbahasa yang terdiri dari enam maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kederewanan, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim kesetujuan, dan maksim kesimpatian. Dari hasil penelitian, tidak semua maksim kesantunan berbahasa ditemukan dalam Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019. Bentuk pematuhan dan pelanggaran terhadap maksim kesantunan berbahasa sama-sama didominasi oleh maksim kebijaksanaan. Bentuk pematuhannya berupa janji-janji dan informasi yang menguntungkan orang lain, sedangkan bentuk pelanggarannya berupa sindiran yang menjatuhkan dan merugikan orang lain. Persentase kesantunan berbahasa dalam Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019 dikategorikan cukup santun karena 54,45% data dari jumlah keseluruhan telah mematuhi maksim kesantunan berbahasa.

Kata kunci: Calon Presiden, Debat, Kesantunan Berbahasa

Abstract

This study aims to describe the obedience and violation of the principle of language politeness in the 2019 Presidential Candidate Public Debate. In this study, this research uses a quantitative description research method so that the data in this study is in the form of sentences that contain obedience and violations of the principle of language politeness. The technique of collecting data was done by (1) documentation, (2) transcription (3) reading and listening methods, and (4) coding. The form of obedience and violation of the politeness principle is determined by the theory of politeness which

consists of six maxims, namely the maxim of wisdom, the maxim of generosity, the maxim of acceptance, the maxim of humility, the maxim of approval, and the maxim of conscience. From the research results, not all politeness maxims were found in the 2019 Presidential Candidate Public Debate. Forms of obedience and violations of politeness maxims were equally dominated by wisdom maxims. The form of obedience is in the form of promises and information that benefit others, while the form of violation is in the form of insinuations that bring down and harm others. The percentage of language politeness in the 2019 Presidential Candidate Public Debate is categorized as quite polite because 54.45% of the data from the total have complied with the maxim of politeness in language.

Keywords: *Debate, Language Civility, Presidential Candidate*

PENDAHULUAN

Debat merupakan metode kampanye yang paling tepat digunakan untuk menyampaikan program-program kerja yang akan dilakukan oleh calon presiden agar diketahui oleh masyarakat. Selain itu, melalui debat masyarakat juga mendapatkan informasi mengenai calon presiden baik dalam menilai persoalan sampai cara menyelesaikan suatu masalah, karena debat merupakan adu argumentasi antara pribadi atau kelompok mengenai suatu permasalahan dimana masing-masing memberikan alasan untuk mempertahankan argumennya. Hal ini sepaham dengan yang dituliskan Dipodjodjo (Rawis, dkk., 2019:3) debat merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan secara lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan gagasan atau pendapat.

Demikian halnya dengan debat yang baru-baru ini diselenggarakan oleh KPU yaitu, debat publik calon presiden periode 2019-2024. Dalam debat tersebut menghadirkan Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Debat calon presiden tahun 2019 ini dilakukan sebanyak lima kali dan menghadirkan tema-tema yang berbeda pada setiap gelarannya. Pada debat pertama menghadirkan tema hukum, ham, korupsi, dan terorisme. Debat kedua dengan tema energi dan pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat ketiga dengan tema pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Debat keempat dengan tema ideologi, pemerintahan dan keamanan, serta hubungan internasional, dan yang kelima dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta industri.

Dari lima debat yang telah dilakukan oleh calon presiden peneliti memilih dua yaitu debat kedua dan debat keempat. Peneliti memilih debat kedua dan keempat ini karena (1) dalam debat kedua dan keempat ini sama-sama hanya menghadirkan calon presidennya saja, (2) debat kedua dan keempat tidak diberi kisi-kisi soal seperti dalam debat yang pertama, (3) tema yang diangkat dalam debat kedua dan keempat menarik bagi peneliti, dan (4) berdasarkan observasi awal dengan menonton kelima debat, di dalam debat kedua dan keempat ini mengandung maksim-maksim prinsip kesantunan berbahasa.

Dalam forum debat tentu harus menggunakan bahasa yang formal yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu masing-masing calon presiden juga harus mampu menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Pemilihan kata yang digunakan calon presiden tentu akan mempengaruhi citra diri dari masing-masing calon presiden karena setiap tuturan akan menggambarkan sebuah kepribadian dan kewibawaan dari seseorang. Hal tersebut dapat dilihat dari seberapa santun bahasa yang digunakan, karena santun dalam berbahasa merupakan hal mutlak yang harus ada dalam diri seseorang ketika berbahasa.

Santun dalam berbahasa akan membuat situasi dalam tuturan terasa nyaman dan menyenangkan karena bahasa yang santun sudah pasti sopan untuk didengar. Menurut Astuti dan Wahyudi (2017:132) kesantunan berbahasa merupakan kemampuan seseorang dalam bertutur secara halus dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mitra tutur sehingga mitra tutur dapat mengerti pesan yang disampaikan oleh penutur dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua pihak. Selanjutnya menurut Rahardi (2005:52) kerja sama yang baik dalam proses bertutur itu, salah satunya dapat dilakukan dengan berperilaku sopan kepada pihak lain dan berperilaku sopan itu dapat dilakukan dengan cara menilai muka si mitra tutur di dalam kegiatan bertutur. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam setiap tuturan seseorang harus berlaku sopan supaya dalam kegiatan bertutur terasa nyaman dan terjalin komunikasi yang baik.

Untuk menilai suatu bahasa dapat dikatakan santun atau tidak diperlukan acuan atau tolak ukur untuk melihat bagaimana bahasa tersebut dikatakan santun atau sebaliknya kurang santun bahkan tidak santun. Tolak ukur tersebut biasa disebut dengan prinsip kesantunan. Banyak para ahli kebahasaan yang membahas mengenai prinsip-

prinsip kesantunan dalam berbahasa, salah satunya seperti yang dipaparkan oleh Leech (Rahardi, dkk., 2016:59) yang membagi prinsip kesantunan berbahasa ke dalam enam maksim. Maksim-maksim kesantunan berbahasa tersebut yaitu: (1) maksim kebijaksanaan, (2) maksim kedermawanan, (3) maksim penerimaan, (4) maksim kerendahan hati, (5) maksim kesetujuan, (6) maksim kesimpatian.

Penelitian ini akan melihat bagaimana kesantunan bahasa kedua calon presiden yang saling beradu argumen dan pendapat. Sebagai orang-orang yang terpandang dan berpendidikan tentu saja setiap perkataannya akan menjadi kepribadian yang dapat dinilai oleh masyarakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Astuti dan Tri Wahyudi (2017) yang berjudul “Kesantunan Berbahasa dalam Surat Kabar *Linggau Pos*”. Hasil penelitian ini menemukan 49 kalimat yang teridentifikasi mematuhi juga melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji prinsip kesantunan berbahasa. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objeknya, dalam penelitian Tri Astuti dan Tri Wahyudi objeknya surat kabar sedangkan dalam penelitian ini objeknya debat calon presiden tahun 2019.

Selanjutnya, penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aida Azizah (2019) dengan judul “Analisis Debat Capres-Cawapres dan Implikasinya dalam Mata Kuliah Pragmatik”. Hasil penelitian ini ditemukan tindak tutur dalam wacana dan implikasinya dalam mata kuliah pragmatik. Dari hasil penelitian relevan tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu objek yang diteliti sama-sama debat capres-cawapres 2019. Namun, penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada pengkajiannya. Dalam penelitian relevan ini yang dikaji adalah analisis wacana sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji prinsip kesantunan berbahasanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti kesantunan berbahasa dalam debat publik calon presiden tahun 2019 dengan teori prinsip kesantunan berbahasa yang dijabarkan oleh Leech. Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan sebagai patokan atau acuan supaya bertutur yang santun dalam debat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang disebut dengan deskriptif kuantitatif. Pemilihan terhadap metode tersebut dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data sesuai dengan kondisi objek yang sebenarnya. Selain itu, metode ini juga akan melakukan pengumpulan data secara gabungan yang mana hasilnya lebih menekankan pada makna serta menggunakan rancangan struktural dengan memberikan dan menerangkan dari segi-segi tertentu mengenai struktur bahasa berdasarkan fakta-fakta kebahasaan.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan seluruh rekaman debat presiden dengan cara mendownload kemudian menetapkan debat kedua dan debat keempat sebagai objek yang akan diteliti, kemudian transkripsi yaitu mentranskripsikan rekaman debat kedua dan debat keempat ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya data dalam bentuk tulisan dianalisis dengan metode simak dan baca untuk mempermudah proses pengidentifikasian penggunaan prinsip kesantunan berbahasanya, dan data yang sudah teridentifikasi diberi kode sesuai dengan jenisnya.

Penentuan terhadap tingkat kesantunan berbahasa dalam Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019, menggunakan rumus kesantunan Chamalah (Astuti dan Wahyudi, 2017) :

$$K_s = \frac{n}{\Sigma} \times 100\%$$

Keterangan:

K_s = Kesantunan

n = Jumlah data pematuhan atau penyimpangan

Σ = Jumlah seluruh data

Sedangkan kriteria pematuhan dan pelanggaran terhadap kesantunan berbahasa dilihat dari presentase sebagai berikut:

Persentase Prinsip Kesantunan Berbahasa

Persentase	Kategori
81% - 100%	Sangat Santun

61% - 80%	Santun
41% - 60%	Cukup Santun
21% - 40%	Kurang Santun
0% - 20%	Tidak Santun

HASIL PENELITIAN

Hasil dari analisis kesantunan berbahasa dalam Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019 ditemukan adanya pematuhan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesantunan berbahasa. Hasil dari data keseluruhan debat kedua dan keempat berjumlah 101 kutipan data baik yang mematuhi maupun yang melanggar. Pematuhan terhadap maksim kesantunan terdapat 55 kutipan data, yaitu 29 maksim kebijaksanaan, 6 maksim kedermawanan, 5 maksim penerimaan, 6 maksim kesetujuan dan 9 maksim kesimpatian. Sedangkan, pelanggaran terhadap maksim kesantunan berbahasa terdapat 46 kutipan data, yaitu 14 maksim kebijaksanaan, 3 maksim kedermawanan, 14 maksim penerimaan, 7 maksim kerendahan hati, dan 8 maksim kesetujuan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pematuhan terhadap maksim kesantunan berbahasa lebih dominan dengan jumlah 55 kutipan data. Persentase data hasil pematuhan sebesar 54,45% dan dikategorikan cukup santun.

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian dalam Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019 berbentuk deskripsi pematuhan dan pelanggaran terhadap maksim keantunan berbahasa. Berikut hasil pematuhan dan pelanggaran yang diperoleh.

a. Pematuhan Prinsip Kesantunan Berbahasa

1) Maksim Kebijaksanaan

Maksim kebijaksanaan mengkehendaki seseorang dalam bertutur untuk selalu membuat kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin.

(002) “Kami kalau berkuasa nanti, insyaallah dapat mandat dari rakyat kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia dan kami akan menjamin bahwa produsen petani, peternak, nelayan harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai itu komitmen kami. Kami juga akan segera turunkan harga listrik, harga makanan-makanan pokok, dan kami akan menyiapkan pupuk dalam keadaan, dalam jumlah berapa yang dibutuhkan, kami akan siapkan sampai ke petani, ini komitmen kami”.

Tuturan tersebut mematuhi dari prinsip maksim kebijaksanaan yaitu, buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Dalam tuturan tersebut Prabowo berusaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi orang lain dengan menjanjikan penghasilan yang lebih baik kepada para petani, peternak, dan nelayan. Beliau juga menjanjikan menurunkan harga listrik dan makanan pokok serta menyediakan pupuk. Apa yang disampaikan oleh Prabowo merupakan janjinya kepada masyarakat Indonesia yang tentu sangat menguntungkan.

(015) “perlunya petani dikenalkan pada yang namanya market place sehingga mereka bisa berjualan secara online sehingga hubungan antara petani dengan konsumen ini semakin dekat. Menyiapkan juga usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, usaha super mikro untuk tahu bagaimana mereka bisa memanfaatkan online system ini sehingga membangun ekosistem offline dan membangun ekosistem online sangat diperlukan dalam waktu yang sangat cepat ini”.

Data tersebut telah mematuhi dari prinsip maksim kebijaksanaan. Tuturan tersebut mengandung makna memperbesar keuntungan karena dalam tuturannya Jokowi memberikan informasi tentang perlunya menggunakan market place dan memanfaatkan online system untuk para petani dan kepada usaha mikro kecil, usaha super mikro. Penyampaian informasi tersebut dimaksudkan agar para petani dan para pemilik usaha kecil dapat mulai belajar menggunakan system online di era yang semakin maju. Selain itu diharapkan juga melalui system online ini dapat membuat hubungan antara petani dan konsumen semakin dekat serta mempermudah proses pembelian.

(060) “Saya, kami berpendapat bahwa kalau kami menerima mandat, kami akan membersihkan lembaga-lembaga pemerintah, kami akan memperkuat lembaga-lembaga pemerintah, kami akan memperbaiki seluruh kehidupan kualitas hidup seluruh aparat pemerintah suapaya kita akan menghilangkan sekuat tenaga korupsi yang ada di republik ini”.

Dalam tuturan tersebut Prabowo memberikan sebuah janji dan berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi orang lain. Prabowo mengatakan bahwa ia akan membersihkan lembaga-lembaga pemerintah, memperkuat lembaga-lembaga pemerintah, memperbaiki seluruh kehidupan aparat pemerintah, dan menghilangkan korupsi yang ada di republik ini. Tuturan Prabowo tersebut merupakan janji kampanye yang akan dilakukukan apabila terpilih dalam pemilihan presiden dan secara tidak langsung kalimat tersebut bertujuan untuk mempengaruhi orang lain.

(062) “Di bidang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan dilan, digital melayani. Oleh sebab itu diperlukan revormasi dalam pelayanan publik

lewat elektronik. Yang kedua diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan, yang ketiga diperlukan peningkatan kualitas SDM aparatur kita dan yang keempat diperlukan revormasi tata kelola. Yang ketiga di bidang pertahanan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan kualitas SDM TNI sangat diperlukan mutlak diperlukan terutama dalam hal penguasaan teknologi persenjataan dan saiber karena ke depan perangnya adalah perang teknologi.

Pada kutipan data tersebut telah mematuhi prinsip maksim kebijaksanaan karena dalam tuturannya Jokowi telah memaksimalkan keuntungan bagi orang lain dengan memberikan informasi mengenai rencana kerjanya ke depan di bidang pemerintahan dan pertahanan. Di bidang pemerintahan diperlukan revormasi dalam pelayanan publik lewat elektronik, penejaman dan penyederhanaan kelembagaan, dan revormasi tata kelola. Kemudian di bidang pertahanan peningkatan kualitas SDM, pengembangan kualitas SDM TNI dan penguasaan tehnologi persenjaan. Semua yang disampaikan oleh Jokowi merupakan informasi mengenai hal yang perlu dan yang akan dikerjakan apabila ia kembali terpilih kembali menjadi presiden. Selain itu, tuturan yang disampaikan oleh Jokowi tidak ada unsur paksaan atau membebani lawan tutur sehingga dapat dikatan Jokowi telah memenuhi prinsip maksim kebijaksanaan ini. Selanjutnya, kutipan data pematuhan maksim kebijaksanaan juga ditemukan pada sekmen dua dengan tema ideologi. Berikut kutipan datanya.

2) Maksim Kedemawanan

Dalam maksim kedermawanan, agar tuturan terasa santun maka penutur harus membuat keuntungan dirinya sendiri sekecil mungkin dan buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin.

(045) “Ya kalo memang ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang masih belum kita lakukan ya itulah sebuah proses koreksi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Kita ini manusia biasa, ada yang sudah kita kerjakan ada juga yang belum kita kerjakan karena negara ini juga negara besar bukan negara kecil”.

Kutipan tersebut telah mematuhi prinsip maksim kedermawanan karena pada tuturan tersebut Jokowi telah memperbesar kerugian pada dirinya dengan mengatakan bahwa memang ada hal yang kurang yang masih belum dilakukan dan Jokowi juga mengatakan bahwa itulah proses koreksi yang harus dilakukan oleh masyarkat. Selain itu, Jokowi juga ingin memperlihatkan bahwa masih banyak kekurangan dalam dirinya dan masih membutuhkan saran-saran dari masyarakat karena dirinya hanyalah manusia biasa dan negara yang dipimpinnya adalah negara yang besar. Selanjutnya pematuhan

pada maksim kedermawanan juga terdapat pada sekmen enam dalam debat inspiratif. Kutipan data tersebut adalah sebagai berikut.

(056) *“Kita ingin negara ini semakin baik dan saya akan pergunakan seluruh tenaga yang saya miliki, kewenangan yang saya miliki untuk memperbaiki negara ini. Tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara tidak ada yang saya takuti kecuali Allah SWT. Untuk Indonesia maju untuk rakyat kita sejahtera”*.

Dalam kutipan data tersebut Jokowi berusaha untuk memperkecil keuntungan bagi dirinya dan memperbesar kerugian bagi dirinya sendiri dengan mengatakan *“Kita ingin negara ini semakin baik dan saya akan pergunakan seluruh tenaga yang saya miliki, kewenangan yang saya miliki untuk memperbaiki negara ini. Tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara”* dengan tuturan tersebut Jokowi berharap masyarakat dapat mengetahui bahwa mereka siap merelakan dirinya demi bangsa dan negara Indonesia.

(059) *“Saya dari sejak 18 tahun telah tanda tangan sumpah untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945, kalau ada yang mau merubah ini akan saya hadapi dengan semua kekuatan yang ada pada diri saya”*.

Pada kutipan data tersebut telah mematuhi prinsip maksim kedermawanan karena dalam tuturannya Prabowo berusaha memaksimalkan kerugian bagi dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa sudah sejak 18 tahun telah tanda tangan sumpah untuk membela kesatuan Republik Indonesia dan bersedia menghadapi siapa pun yang berniat merubahnya dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Kutipan data pematuhan maksim kebijaksanaan juga ditemukan pada sekmen empat dengan tema pertahanan dan keamanan. Berikut ini adalah kutipan data pematuhannya.

(073) *“Mengenai anggaran juga perlu saya sampaikan, anggaran di kementerian pertahanan kita sekarang sudah 107 triliun nomor dua setelah kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main, bahwa masih ada yang proses, ada yang kurang inilah yang harus kita perbaiki sebagai pemimpin”*.

Pada kutipan data tersebut telah mematuhi prinsip maksim kedermawanan karena dalam tuturannya Jokowi telah memperkecil keuntungan bagi dirinya dan memperbesar kerugian bagi dirinya sendiri. Hal tersebut terlihat pada tuturan Jokowi

yang mengatakan bahwa anggaran pertahanan Indonesia sudah 107 triliun. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa memang masih ada yang kurang dari yang telah kerjakannya dan mengajak untuk memperbaikinya bersama.

3) Maksim Penerimaan

Maksim penerimaan mengkehendaki supaya tuturan terasa santun maka penutur harus sesedikit mungkin memberikan kecaman kepada orang lain dan puji-pujilah orang lain sebanyak mungkin.

(005) “Saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para petani jagung, kita ingat di 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung, tahun 2018 kita hanya impor 180 ribu ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton yang telah dilakukan oleh petani ini sudah lompatan besar”.

Dari tuturan tersebut terlihat Jokowi telah mematuhi prinsip maksim penerimaan dengan memaksimalkan pujian dan penghargaan terhadap orang lain. Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para petani di Indonesia yang telah berhasil mengalami peningkatan produksi jagung dan ini merupakan bentuk apresiasi serta kebanggaan yang ditunjukkan Jokowi.

(023) “Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa setiap arah, setiap usaha ke arah kemandirian di bidang energi kita sambut baik dan kami kalau demikian juga kami bisa mengakui bahwa memang Pak Jokowi dengan pemerintahannya telah melakukan hal-hal yang positif di bidang itu”.

Kecamlah orang lain sesedikit mungkin dan puji-pujilah orang lain sebanyak mungkin merupakan prinsip dari maksim penerimaan. Dalam kutipan tersebut Prabowo telah mematuhi prinsip maksim penerimaan terbut dengan mengakui bahwa kerja Jokowi baik dan telah membawa kepada perubahan yang positif terutama pada bidang energi. Dengan demikian tuturan tersebut dapat dikatakan santun.

(079) “Kemudian juga yang berkaitan dengan FBA yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan kita juga memiliki diplomat-diplomat yang sangat pintar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian itu dan CEVA”.

Kutipan tersebut telah mematuhi prinsip maksim penerimaan yaitu puji-pujilah orang lain sebanyak mungkin. Dalam tuturannya Jokowi telah memaksimalkan pujian terhadap orang lain mengatakan “*kita juga memiliki diplomat-diplomat yang sangat pintar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian itu*

dan CEVA” yang secara tidak langsung memberikan pujian dan penghargaan atas kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang dipemerintahannya.

4) Maksim Kesetujuan

Dalam maksim kesetujuan, agar terasa santun maka seseorang harus memaksimalkan agar ketidaksepakatan antara diri sendiri dengan orang lain sesedikit mungkin dan usahakan kesepakatan antara diri sendiri dengan orang lain terjadi sebanyak mungkin.

(044) “saya ini hampir setiap minggu, setiap bulan bertemu dengan nelayan, ke kampung nelayan bahkan Bapak Ibu bisa tanya ke kampung nelayan di Tambak Lorok di Semarang, jam 12 malam, tengah malam saya berdua dengan sopir, berdua saja kesana untuk memastikan bagaimana kondisi nelayan yang benar karena betul banyak laporan ke saya yang tidak baik, banyak laporan saya yang baik, tapi saya ingin memastikan nelayan itu betul-belul seperti apa”.

Dalam peristiwa tutur terkadang ketidaksesuaian atau ketidakcocokan bisa saja terjadi. Prinsip dari maksim kesetujuan adalah seseorang harus mengusahakan agar kesepakatan antara diri sendiri dengan orang lain terjadi sebanyak mungkin tetapi apabila terjadi ketidakcocokan, pemilihan kata yang digunakan akan mempengaruhi nilai kesantunan dalam bahasa yang digunakan. Seperti pada tuturan yang disampaikan Jokowi yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo bahwa banyak laporan-laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jokowi membantah itu semua dengan mengatakan bahwa setiap minggu, setiap bulan ia datang ke kampung-kampung nelayan untuk melihat dan memastikan sendiri kondisi para nelayan dengan laporan yang diperoleh. Tuturan tersebut terasa santun karena Jokowi menyatakan ketidaksetujuannya tidak secara total melainkan secara parsial.

(046) “Saya kira tidak ada masalah, bagi kami adalah masalah strategi yang berbeda, strategi kami berbeda itu saja. Kita mengerti maritim sangat penting tapi kita juga prihatin bahwa pelabuhan-pelabuhan di bawah pemerintahan Bapak operasionalnya di serahkan ke perusahaan-perusahaan asing Pak”.

Tuturan dalam kutipan tersebut telah terjadi ketidaksepakatan antara Prabowo dan Joko. Dalam kutipatan tersebut Prabowo menjelaskan tentang cara pandanginya dalam menangani sebuah masalah itu berbeda, tentu saja ini tidak sesuai dengan prinsip maksim kesetujuan yang mengkehendaki agar kesepakatan antara diri sendiri dengan

orang lain terjadi sebanyak mungkin. Namun, meskipun demikian ketidaksetujuan Prabowo dengan cara kerja yang dilakukan oleh Jokowi tidak disampaikan secara total melainkan secara parsial sehingga tuturan tersebut masih terasa santun untuk digunakan.

(089) “Kalau punya segala sistem online, sistem pelayanan publik suatu pintu dan sebagainya tetapi tetap politik kolwil untuk menghilangkan korupsi itu tidak ditegakkan ya menurut saya tetap lembaga-lembaga itu lemah dan kita mengetahui syarat negara berhasil adalah lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, efektif tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada sogok menyogok, tidak boleh ada jual beli jabatan”.

Semakin sering terjadi kesepakatan antara diri sendiri dengan orang lain maka orang tersebut akan dianggap santun. Dalam tuturannya Prabowo menyampaikan ketidaksesuaiannya atau ketidakcocokannya terhadap apa yang disampaikan oleh Jokowi mengenai sistem online. Menurut Prabowo kalau punya sistem online atau sistem pelayanan publik tapi politik kolwil untuk menghilangkan korupsi tidak ditegakkan maka tetap saja lembaga itu lemah karena menurutnya sia-sia jika memiliki sistem online yang baik namun lembaga pemerintahnya tidak kuat. Namun, meski ketidakcocokan itu terjadi, bahasa yang digunakan oleh Prabowo tetaplah santun karena Prabowo menyatakan ketidaksetujuannya tidak secara total melainkan secara parsial.

(097) “Kalau menurut saya misalnya itu pelabuhan untuk angkatan laut kita diberikan kepada asing itu yang tidak betul. Atau pun bandara misalnya bandara di Madiun yang dipakai untuk menyimpan pesawat-pesawat kita di situ kemudian kita berikan kepada asing itu yang tidak betul. Tetapi kalau airport-airport komersial, pelabuhan-pelabuhan komersial mengapa tidak? Dan itu juga dikelola oleh pelindo kok, mayoritas masih dikelola oleh pelindo”.

Prinsip dari maksim kesetujuan mengkehendaki kesepakatan antara diri sendiri dengan orang lain terjadi sebanyak mungkin. Dalam menanggapi tuturan Prabowo sebelumnya Jokowi membantah telah memberikan pelabuhan dan bandara dengan mengatakan *“Kalau menurut saya misalnya itu pelabuhan untuk angkatan laut kita diberikan kepada asing itu yang tidak betul. Atau pun bandara misalnya bandara di Madiun yang dipakai untuk menyimpan pesawat-pesawat kita di situ kemudian kita berikan kepada asing itu yang tidak betul”* artinya kecocokan diantaranya tidak terjadi. Namun, meski Jokowi membantah semua tuturan Prabowo sebelumnya, Jokowi tetap menggunakan bahasa yang santun dan ketidaksepakatan tersebut tidak secara total karena Jokowi juga mengatakan *“Tetapi kalau airport-airport komersial, pelabuhan-*

pelabuhan komersial mengapa tidak? Dan itu juga dikelola oleh pelindo kok, mayoritas masih dikelola oleh pelindo” yang berarti tuturan Prabowo tidak semuanya salah tetapi Jokowi juga ingin meluruskan dan menjelaskan kebenaran yang ada mengenai pelabuhan dan bandara tersebut.

5) Maksim Kesimpatian

Dalam maksim kesimpatian, seseorang akan dikatakan santun apabila telah mengurangi rasa antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan tingkatan rasa simpati sebanyak-banyaknya terhadap orang lain.

(003) “Masalah pokok bangsa kita adalah bahwa kekayaan kita tidak tinggal di republik kita. Ini bukan salah siapa pun, ini salah kita semua sebagai bangsa”.

Tuturan tersebut telah mengasosiasikan dari prinsip maksim kesimpatian karena dalam tuturannya Prabowo menunjukkan rasa keprihatinannya terhadap kondisi dimana kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia sehingga menggerakkan rasa kepeduliannya untuk mengajak mengatasi permasalahan tersebut secara bersama-sama.

(010) “Saya kira ini adalah pendekatan kerakyatan yang selalu saya bicarakan bahwa infrastruktur sangat-sangat penting tetapi tentunya infrastruktur harus berorientasi kepada kepentingan yang besar untuk meningkatkan produksi dan kompetitif kita sehingga kita bisa menghasilkan nilai-nilai tambah dari segi ekonomi kita, bukan menjadi beban kepada masyarakat”.

Data dari kutipan tersebut telah mematuhi prinsip maksim kesimpatian yaitu tingkatan rasa simpati sebanyak-banyaknya terhadap orang lain. Dalam tuturan tersebut Prabowo telah menunjukkan rasa simpatinya terhadap masyarakat dengan mengatakan bahwa infrastruktur harus berorientasi kepada kepentingan besar untuk meningkatkan produksi dan nilai-nilai tambah dari segi ekonomi jangan sampai menjadi beban kepada masyarakat. Dari tuturannya tersebut terlihat bahwa Prabowo peduli terhadap perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia.

(099) “Itulah yang mungkin sudah tiga kali saya sampaikan di dalam forum Asean untuk kita bersama-sama anggota Asean ini memberikan bantuan, mencari solusi bagi saudara-saudara kita muslim Rohingnia yang ada di Cox’s Bazar yang kita lihat kondisinya betul-betul hidup di tenda-tenda dan betul-betul sangat memprihatinkan dan alhamdulillah desakan kita, tekanan kita terhadap pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan repatriasi di Cox’s Bazar untuk kembali lagi ke Rakhine State mulai memberikan hasil”.

Kutipan pada data tersebut telah mematuhi prinsip maksim kesimpatian yaitu tingkatan rasa simpati sebanyak-banyaknya terhadap orang lain. Dalam tuturan yang disampaikan oleh Jokowi terlihat rasa simpati dan kepeduliannya terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat muslim Rohingya yang ada di Cox's Bazar. Jokowi menyampaikan bagaimana mereka betul-betul hidup di tenda-tenda yang mamperhatikan. Kepedulian tersebut semakin nampak saat Jokowi mengatakan *"alhamdulillah desakan kita, tekanan kita terhadap pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan repatriasi di Cox's Bazar untuk kembali lagi ke Rakhine State mulai memberikan hasil"* artinya ada tindakan yang dilakukan oleh Jokowi untuk membantu masyarakat muslim Rohingya tersebut. Dengan demikian Jokowi telah mengurangi rasa antipatinya dan meningkatkan rasa simpatinya.

b. Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa

1) Maksim Kebijaksanaan

Dalam maksim kebijaksanaan haruslah selalu berusaha untuk tidak memberikan kerugian pada orang lain dan selalu memperbesar keuntungan orang lain. Apabila sebuah tuturan tidak memegang prinsip tersebut maka tuturan tersebut akan dikatakan telah melanggar maksim kebijaksanaan. Pelanggaran tersebut dapat dilihat dari tuturan yang memiliki maksud menyindir orang lain atau menggunakan kata-kata yang dapat membebani orang lain. Seseorang yang telah melanggar maksim kebijaksanaan berarti telah memberikan kerugian bagi orang lain dan telah memperkecil keuntungan bagi orang lain.

(008) "Jadi ini yang jadi masalah, infrastruktur harus untuk rakyat bukan rakyat untuk infrastruktur. Ga bisa nanti infrastruktur hanya jadi monumen tapi tidak dimanfaatkan. Sebagai contoh LRT di Palembang dan lapangan terbang, kerja jati, dan macem-macem lagi pelabuhan yang ga kepakai".

Dalam tuturan tersebut telah melanggar prinsip maksim kebijaksanaan yaitu buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Prabowo dalam tuturannya mengatakan bahwa banyak infrastruktur yang tidak terpakai atau tidak dimanfaatkan. Hal ini tentu merugikan Jokowi dan juga tim kerjanya karena akan menimbulkan persepsi dari banyak orang bahwa yang dikerjakan oleh Jokowi dan tim kerjanya itu tidak efisien dan tidak bermanfaat untuk masyarakat.

(013) *“ehh kalou kita bandingkan dengan indeks perkilo meter infrastruktur apakah itu apakah itu jalan tol, apakah itu LRT, apakah itu kereta api yang dilaksanakan di Vietnam, di Thailan, di Malaysia, di Maroko, semuanya itu adalah dua kali lebih efesien, dua kali lebih murah rata-rata dari di Indonesia Pak”*.

Dalam tuturan tersebut Prabowo memberikan informasi mengenai penggunaan infrastruktur seperti jalan tol dan LRT di Thailand, Malaysia, dan Maroko itu jauh lebih murah dari di Indonesia. Hal ini seperti menyindir hasil kerja yang dilakukan oleh Jokowi bahwa infrastruktur yang sudah ada di Indonesia belum bisa sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Tuturan tersebut telah melanggar prinsip maksim kebijaksanaan yaitu buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Tuturan tersebut melanggar prinsip maksim kebijaksanaan karena tuturan yang disampaikan oleh Prabowo dapat merugikan Jokowi karena masyarakat akan menganggap bahwa yang dikerjakan oleh Jokowi itu tidak menguntungkan bagi masyarakat.

(063) *“Menurut pendapat saya pancasila ini walaupun kita tidak mau menggunakan pendekatan indoktrinasi tapi kita harus memasukkan pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita, pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA harus dimasukkan dalam edukasi bukan indoktrinasi tapi dalam pendidikannya dalam kurikulum”*.

Pada tuturan tersebut Prabowo menggunakan kata *“harus”* yang tentu saja membebani mitra tutur karena berarti sesuatu hal yang disampaikan itu wajib untuk dilakukukan. Tuturan Prabowo ini telah melanggar prinsip maksim kebijaksanaan karena telah memberikan kerugian bagi mitra tutur dengan dalam tuturannya tidak memberikan pilihan suatu pilihan pada mitra tutur. Kalimat tersebut akan lebih santun apabila kata *“harus”* diganti dengan kata *“sebaiknya”* sehingga tuturan tidak terkesan memaksakan kehendaknya sendiri.

(064) *“Saya yakin dan percaya Pak Jokowi pancasilais, saya yakin dan percaya Pak Jokowi patriot, saya yakin dan percaya Pak Jokowi nasionalis karna itu waktu Pak Jokowi dilantik saya datang ke Pak Jokowi saya memberi hormat. Tapi saya juga ingin bertanya apakah Pak Jokowi paham dan mengerti diantara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya? Seolah saya, seolah-olah saya membela khilafah, seolah-olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya”*.

Tuturan pada kutipan tersebut telah melanggar prinsip maksim kebijaksanaan karena tuturan yang disampaikan oleh Prabowo mengandung sindiran yang dapat

merugikan orang lain. Dalam tuturannya Prabowo mengatakan bahwa Jokowi adalah orang yang pancasilais, patriot, nasionalis yang awalnya seperti ingin memuji tapi sebenarnya ingin menyindir dan menjatuhkan dengan bertanya “*apakah Pak Jokowi paham dan mengerti diantara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya?*” pertanyaan tersebut seolah ingin menuding Jokowi dan pendukungnya. Tentu saja ini akan memberikan kerugian bagi tim Jokowi dan secara tidak langsung Prabowo telah memperbesar kerugian bagi orang lain.

2) Maksim Kedermawanan

Pelanggaran terhadap maksim kedermawanan terjadi apabila seseorang memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Keuntungan bagi diri sendiri tersebut berupa tuturan yang meninggikan diri sendiri sehingga menimbulkan sikap congkak dan menyombongkan diri.

(042) “Yang pertama mengenai BUMN perikanan mungkin Bapak belum tahu bahwa kita telah memiliki yang namanya Perindo, kita telah memiliki yang namanya Perinus. Itu membantu membeli ikan-ikan yang ada di rakyat. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan perizinan untuk nelayan-nelayan kecil yang memiliki bobot 10 GT ke bawah ini sudah tidak pake izin lagi hanya yang 10-30, 30 ke atas yang harus mendapatkan izin baik dari KP maupun dari Provinsi sehingga kita harapkan dengan semakin cepatnya perizinan dengan yang kecil-kecil gak ada izin mereka bisa melaut dan mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, kita juga telah membentuk yang namanya Bank Mikro Nelayan agar para nelayan ini bisa mengakses ke bidang keuangan”.

Pada kutipan data tersebut telah melanggar prinsip maksim kedermawanan yaitu buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin. Dalam tuturannya Jokowi menanggapi jawaban Prabowo mengenai persoalan nelayan-nelayan miskin. Jokowi menyebutkan bahwa sudah ada Perindo dan Perinus untuk membantu mambeli ikan yang ada di rakat, kemudian Jokowi juga mengatakan bahwa nelayan-nelayan kecil tidak perlu izin untuk melaut yang tentu memudahkan nelayan-nelayan kecil, dan sudah membentuk Bank Mikro agar nelayan bisa mengakses ke bidang keuangan. Semua yang disampaikan oleh Jokowi digunakan untuk menanggapi pernyataan dari Prabowo sebelumnya dan tuturan Jokowi tersebut seolah memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri karena berusaha menunjukkan pada Prabowo bahwa apa yang akan menjadi program kerja Prabowo telah dilakukannya terlebih dahulu. Selain itu, tuturan Jokowi

tersebut menimbulkan kesan sombong dan congkak serta bersikap tinggi hati. Tentu saja ini tidak sesuai dengan prinsip maksim kedermawanaan. Selanjutnya, pelanggaran maksim kedermawanaan juga ditemukan pada sekmen enam dengan debat inspiratif.

(055) “Rakyat Indonesia yang saya cintai, mengelola negara sebesar Indonesia ini tidak mudah, tidak gampang. Sangat beruntung sekali saya mamiliki pengalaman mengelola sebuah kota sebagai wali kota, kemudian mengelola provinsi di DKI Jakarta dan empat setengah tahun ini mengelolah negara kita Indonesia. Butuh sebuah ketegasan, butuh sebuah keberanian dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk kebaikan negera ini. Mafiagasametra telah kita bubarkan, blok minyak rukan telah kita kelolah, blok minyak mahakam telah kita kelola, pripot 51% mayoritas telah kita ambil”.

Data tersebut telah melanggar prinsip maksim kedermawanaan karena dalam tuturan Jokowi berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri dengan meninggikan dirinya sendiri serta memposisikan dirinya di atas, hal itu dilihat dari tuturan Jokowi yang mengatakan *“Sangat beruntung sekali saya mamiliki pengalaman mengelola sebuah kota sebagai wali kota, kemudian mengelola provinsi di DKI Jakarta dan empat setengah tahun ini mengelolah negara kita Indonesia. Butuh sebuah ketegasan, butuh sebuah keberanian dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk kebaikan negera ini”* tuturan Jokowi seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu memimpin karena sebelumnya sudah pernah menjadi wali kota, gubernur, dan telah menjadi presiden periode lalu. Dengan demikian orang-orang bisa tahu bahwa dia layak untuk menjadi seorang presiden kembali di periode ini dan tentu ini tidak mengasosiasikan dari prinsip maksim kedermawanaan yang mengharuskan penutur untuk membuat kerugian yang sebesar-besarnya pada diri sendiri dan yang selalu memposisikan dirinya selalu di bawah.

(092) “Di pemerintah pusat sendiri sekarang ada yang namanya OSS (online Single Submidsen) yang dulunya kalau kita ngurus izin bisa enam bulan bisa setahun sekarang 9 izin bisa keluar dalam waktu 3 jam. Justru dengan cara inilah korupsi itu akan berkurang dan akan hilang karna ada transparansi, ada kecepatan, ada sistem yang membangun”.

Tuturan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri dan ini tentu tidak sejalan dengan prinsip maksim kedermawanaan. Jokowi mengatakan bahwa di pusat ada yang namanya OSS yang digunakan untuk mengurus surat izin dalam waktu 3 jam. Tuturan tersebut menunjukkan sikap menyombongkan diri yang dilakukan oleh Jokowi atas hasil

kerjanya dan sikap meninggikan diri atau memberi keuntungan bagi dirinya sendiri semakin terasa dengan mengatakan *"Justru dengan cara inilah korupsi itu akan berkurang dan akan hilang karna ada transparansi"*. Dengan demikian Jokowi telah melanggar prinsip maksim kedermawanan.

3) Maksim Penerimaan

Seorang penutur akan dianggap telah melanggar prinsip maksim penerimaan apabila dalam tuturannya banyak memberikan celaan atau kecaman kepada orang lain.

(007) "Saya menghargai niat pak Jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim pak Jokowi itu bekerjanya kurang efisien. Banyak infrastruktur yang dikerjakan yang dilaksanakan dengan grusa-grusu tanpa fisibilitas tadi yang benar dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien, yang rugi, bahkan yang sangat-sangat sulit untuk dibayar".

Kutipan tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip maksim penerimaan yaitu kecamlah orang lain sesedikit mungkin dan puji-pujilah orang lain sebanyak mungkin. Prabowo mengatakan bahwa infrastruktur yang dikerjakan oleh Jokowi dan tim kerjanya dikerjakan dengan grusa-grusu dan tanpa fisibilitas sehingga banyak proyek infrastruktur yang tidak efektif dan rugi. Tuturan tersebut seolah mencela dan mencera apa yang telah dilakukan oleh Jokowi dan tim kerjanya, hal ini tentu tidak sesuai dengan esensi maksim penerimaan dan dapat dikatakan bahasanya kurang santun.

(014) "kalau kita pelajari dan kalau kita liat sekarang dalam laporan-laporan Bank dunia yang terakhir-terakhir justru mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita secara real dari pada pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang dianggap tidak efisien dan tidak, tidak sesuai dengan proses-proses yang tertib".

Dari kutipan tersebut telah melanggar dari prinsip maksim penerimaan yaitu kecamlah orang lain sesedikit mungkin dan puji-pujilah orang lain sebanyak mungkin. Dalam tuturan tersebut Prabowo mengatakan bahwa infrastruktur-infrastruktur yang dikerjakan selama masa kerja Jokowi tidak ada dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk kecaman yang bersifat menjatuhkan. Dalam peristiwa tutur tentu ini dapat dikatakan tidak santun karena semakin banyak kecaman terhadap orang lain tentu tuturan tersebut tidak santun.

(070) *“saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan kenapa? Karena kita tidak punya uang, karena itu kita harus menjaga keuangan kita, kemana keuangan kita? Keuangan kita, kekayaan kita, harta kita tidak tinggal di Indonesia karna itu kita lemah”*.

Tuturan pada kutipan tersebut telah melanggar prinsip maksim penerimaan karena dalam tuturannya Prabowo telah memperbesar kecaman kepada Jokowi dengan mengatakan bahwa pertahanan Indonesia terlalu lemah karena tidak punya uang. Tuturan tersebut seolah-olah menilai langsung dari cara kerja Jokowi yang kurang baik sebagai Presiden dalam menjaga keamanan. Selain itu, Prabowo juga mengatakan *“kemana keuangan kita? Keuangan kita, kekayaan kita, harta kita tidak tinggal di Indonesia karna itu kita lemah”* yang juga secara tidak langsung mencela Jokowi.

(074) *“maaf Pak Jokowi mungkin Pak Jokowi dapat briving-briving yang kurang tepat. Jadi 107 triliun itu yah 5% dari APBN kita 0,8% dari JDP kita, padahal Singapur itu anggaran pertahannya 30% dari APBNnya 30%, 3% dari JDP mereka, saya hanya mengatakan saya pengalaman pak di tentara, budaya ABS banyak pak”*.

Pada kutipan data tersebut telah melanggar prinsip maksim penerimaan karena pada tuturannya Prabowo banyak memberikan cercaan dan mengecam dengan mengatakan bahwa Jokowi telah mendapat briving-briving yang kurang tepat. Dalam tuturannya Prabowo juga telah memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian Prabowo belum memegang prinsip maksim ini.

4) Maksim Kerendahan Hati

Pelanggaran terhadap maksim kerendahan hati terjadi apabila seorang penutur memperbesar pujian bagi dirinya sendiri. Semakin sering memuji atau meninggikan dirinya sendiri maka orang tersebut semakin dianggap tidak santun.

(006) *“Ya saya kira dalam empat tahun ini telah kita bangun banyak sekali baik itu yang namanya jalan, jalan tol, pelabuhan baru maupun pengembangan, airport baru maupun pengembangan. Dan inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektifitas antar pulau, konektifitas antar provinsi, konektifitas antar kabupaten dan kota itu betul-betul tersambungkan dengan baik”*.

Tuturan tersebut melanggar maksim kerendahan hati yaitu pujilah diri sendiri sesedikit mungkin. Jokowi memberikan informasi tentang program kerja yang telah dilaksanakannya salah satunya yaitu pembangunan jalan tol. Tuturan Jokowi seolah

ingin meninggikan dirinya sendiri dengan menunjukkan tentang pencapaian kerjanya selama ini dan hal tersebut merupakan bentuk pujian terhadap dirinya dan tim kerjanya sehingga dianggap melanggar prinsip maksim kerendahan hati.

(012) “Kemudian untuk ganti rugi mungkin Pak Prabowo bisa liat dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita karna apa? Tidak ada ganti rugi yang ada ganti untung”.

Data dari kutipan tersebut telah melanggar prinsip maksim kerendahan hati yaitu pujilah diri sendiri sesedikit mungkin. Dalam tuturan tersebut Jokowi tampak memuji hasil kerjanya yang mengatakan tidak ada ganti rugi yang ada ganti untung sehingga tidak ada konflik pembebasan lahan. Tuturan tersebut terasa kurang santun karena ada unsur meninggikan diri sendiri yang dilakukan oleh Jokowi.

(065) “Jadi saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela pancasila, nyawa saya, saya pertaruhkan untuk republik ini. Bagaimana kok saya dituduh akan merubah pancasila, sungguh kejam itu”.

Kutipan data dalam tuturan tersebut telah melanggar prinsip maksim kerendahan hati karena Prabowo dalam tuturannya seolah ingin meninggikan dirinya dengan mengatakan “*saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela pancasila, nyawa saya, saya pertaruhkan untuk republik ini*” tuturan tersebut seolah ingin menunjukkan bahwa sejak dulu ia telah menjadi pahlawan yang membela negara Indonesia. Selanjutnya, pelanggaran maksim kerendahan hati juga ditemukan pada sekmen lima dengan tema debat hubungan internasional. Berikut ini adalah kutipan datanya.

(078) “saya ini TNI pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI, saya lebih TNI lebih dari banyak TNI”.

Berdasarkan tuturan tersebut Prabowo telah melanggar prinsip maksim kerendahan hati karena dalam tuturannya Prabowo terlalu membanggakan dan meninggikan dirinya dengan mengatakan dirinya adalah TNI lebih dari banyak TNI.

(080) “Masalahnya Pak Jokowi saya ini memang profesi bidang saya adalah pertahanan keamanan, saya pelajari ilmu perang, ribuan tahun sejarah perang saya pelajari, teknologi saya masih kuasai pak, saya tahu jarak-jarak peluru kendali masih saya tahu. Jadi saya mohon pak ini bukan menyalahkan tapi saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah”.

Berdasarkan tuturan pada kutipan tersebut termasuk ke dalam pelanggaran prinsip maksim kerendahan hati, karena tuturan yang disampaikan oleh Prabowo terlalu memosisikan dirinya di atas dan terlalu membanggakan dirinya dengan mengatakan *“memang profesi bidang saya adalah pertahanan keamanan, saya pelajari ilmu perang, ribuan tahun sejarah perang saya pelajari, teknologi saya masih kuasai pak, saya tahu jarak-jarak peluru kendali masih saya tahu”* tentu saja ini tidak sesuai dengan prinsip maksim kerendahan hati.

5) Maksim Kesetujuan

Seorang penutur akan dikatakan telah melanggar maksim kesetujuan apabila seseorang tersebut banyak memberikan bantahan atau ketidaksetujuan dengan pendapat orang lain.

(009) “Ya kalo tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa fisibilitas tadi saya kira salah besar karena ini sudah direncanakan lama. Ini sudah direncanakan lama, tentu saja semuanya ada dan ada juga DED nya semuanya ada, dan mengenai tadi yang disampaikan misalnya LRT Palembang atau LRT, MRT Jakarta, semuanya butuh waktu”.

Pada kutipan tersebut terlihat ketidaksesuaian antara Prabowo dan Jokowi. Dalam tuturannya Jokowi menyangkal pendapat Prabowo yang mengatakan bahwa pembangunan-pembangunan infrastruktur yang dilakukan tersebut tanpa fisibilitas. Jokowi juga berspekulasi bahwa penggunaan LRT Palembang atau MRT Jakarta semuanya butuh waktu. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tuturan tersebut telah melanggar prinsip maksim kesetujuan yang mengharuskan seseorang untuk selalu mengusahakan kesepakatan antara diri sendiri dengan orang lain terjadi sebanyak mungkin.

(011) “Sebetulnya kalau pembangunan infrastruktur untuk rakyat tadi di depan sudah saya sampaikan pembangunan 191 ribu kilometer jalan-jalan di desa itu adalah betul-betul untuk rakyat di bawah. Ini yang sering tidak dilihat orang”.

Data tersebut telah melanggar prinsip maksim kesetujuan untuk memaksimalkan kesepakatan dengan orang lain terjadi. Dalam tuturannya Jokowi menentang apa yang dikatakan oleh Prabowo sebelumnya yang mengatakan bahwa infrastruktur harus berorientasi kepada masyarakat dan Jokowi di sini ingin menegaskan bahwa infrastruktur yang telah dikerjakannya benar-benar memang untuk rakyat.

(075) “Saya melihat Pak Prabowo ini tidak percaya pada TNI kita, saya yang sipil, saya sangat percaya kepada TNI yang kita miliki, sangat percaya karena misalnya yang seperti tadi saya ceritakan di natuna saya lihat sendiri kok dibangun, dibangun di sana, di sorong juga sudah mulai dibangun saya cek ada bener barangnya”.

Berdasarkan tuturan tersebut, Jokowi memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Prabowo sebelumnya mengenai briving-briving yang kurang tepat. Jokowi membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa Prabowo yang tidak percaya pada TNI karena menurut Jokowi semua yang dikerjakan benar ada dan sudah dicek. Dari tuturan tersebut terlihat Jokowi telah melanggar prinsip maksim kesetujuan karena banyak ketidaksesuaian diantara keduanya. Selanjutnya, kutipan data pelanggaran maksim kesetujuan juga ditemukan dalam sekmen enam pada debat terbuka. Kutipan data pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut.

(087) “Ini yang namanya perkiraan, artinya intelegenstrategis kita ini memperkirakan tidak ada. Oleh sebab itu, dalam rangka strategi ke depan mestinya yang dipentingkan sebelah mana kita menjadi tahu jangan sampai kita keliru memperkirakan ke depan sehingga strateginya juga menjadi keliru. Inilah yang ingin saya garis bawahi, bukan tidak tetapi diperkirakan intelegenstrategis memperkirakan, jadi perkiraan. Ya yang namanya perkiraan bisa betul tetapi juga bisa keliru”.

Prinsip dari maksim kesetujuan adalah menghendaki supaya kesepakatan antara diri sendiri dengan orang lain terjadi sebanyak mungkin. *“Inilah yang ingin saya garis bawahi, bukan tidak tetapi diperkirakan intelegenstrategis memperkirakan, jadi perkiraan”* dalam kutipan tersebut Jokowi membantah perkataan Prabowo sebelumnya. Menurut Jokowi perkiraan itu penting untuk mengetahui sebelah mana yang mesti dipentingkan dahulu dan Jokowi juga mengatakan yang namanya perkiraan bisa betul bisa juga keliru. Dengan demikian kesepakatan diantara keduanya tidak terjadi dan Jokowi telah melanggar prinsip maksim kesetujuan.

c. Tingkat Kesantunan Berbahasa Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019

Berdasarkan hasil nilai persentase dari pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa tersebut, peneliti konsultasikan dengan tabel persentase yang telah ditetapkan sebelumnya, penggunaan bahasa dikatakan santun apabila hasil persentase berkisar pada 61% - 80%. Berdasarkan hasil penelitian dalam Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019, persentase pematuhan prinsip kesantunan berbahasanya yaitu

54,45% dan persentase pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa yaitu 45,54%. Dengan demikian, Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019 dapat dikatakan cukup santun karena berada pada antara nilai persentase 41% - 60% yang dikategorikan cukup santun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kesantunan berbahasa yang telah dilakukan oleh peneliti pada Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019 dalam debat kedua dan keempat dapat disimpulkan bahwa tidak semua maksim kesantunan berbahasa ditemui dalam debat publik calon presiden tahun 2019. Pematuhan terhadap prinsip kesantunan berbahasa didominasi oleh maksim kebijaksanaan, berikutnya maksim kesimpatian, maksim kesetujuan, maksim kedermawanan, dan maksim penerimaan. Sedangkan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa didominasi oleh maksim kebijaksanaan, berikutnya maksim penerimaan, maksim kesetujuan, maksim kerendahan hati, dan maksim kedermawanan.

Jika dilihat dari frekuensi jumlah pematuhan dan jumlah pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa, bentuk pematuhan memiliki jumlah frekuensi yang lebih besar yaitu 54,45% yang termasuk dalam kategori cukup santun, sedangkan jumlah frekuensi pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa jumlahnya sebesar 45,54%. Dengan demikian hasil penelitian prinsip kesantunan berbahasa dalam Debat Publik Calon Presiden Tahun 2019 dapat dikategorikan cukup santun.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyaruddin, A., Priyanto, P., & Agusti, A. (2018). Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Debat Publik Calon Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018. *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 7(2), 95-108.
- Astuti, T., & Wahyudi, T. (2017). Kesantunan Berbahasa Dalam Surat Kabar Linggau Pos. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran (KIBASP)*, 1(1), 130-146.
- Azizah, A. (2019). Analisis Wacana “Debat Capres-Cawapres 2019” Dan Implikasinya Dalam Mata Kuliah Pragmatik. *Sasando: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal*, 2(2), 1-9.
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Murti, S., Muslihah, N. N., & Sari, I. P. (2018). Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Kehormatan di Balik Kerudung Sutradara Tya Subiakto Satrio. *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing*, 1(1), 17-32.
- Muslihah, N. N., & Febrianto, R. (2017). Pematuhan Dan Penyimpangan Prinsip Kesantunan Berbahasa Dalam Wacana Buku Teks Bahasa Indonesia. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran (KIBASP)*, 1(1), 99-118.
- Pranowo. (2012). *Berbahasa Santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardi, K., Setyaningsih, Y. & Dewi, R. P. (2016). *Pragmatik: Fenomena Ketidaksantunan Berbahasa*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Rawis, J. A., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).